

Yosua Pardamean Samuel
Analisis Legislatif Ahli Pertama
yosua.samuel@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu instrumen penting negara dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pembangunan nasional. Perannya yang strategis bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memastikan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan. Selama ini, untuk mendorong kinerja manajemen, diterapkan sistem insentif berupa tantiem atau bonus bagi komisaris dan direksi. Namun, dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di DPR RI, Presiden Prabowo, menegaskan bahwa praktik tantiem akan dihapuskan. Hal ini karena skema tersebut seringkali disalahgunakan, bahkan justru membebani keuangan negara dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi.

Kebijakan penghapusan tantiem memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menata ulang arah BUMN agar lebih fokus pada misi efisiensi, akuntabilitas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan meniadakan bonus variabel yang selama ini kerap menuai kritik, manajemen BUMN diarahkan untuk bekerja sepenuhnya berdasarkan profesionalisme dan bukan sekadar insentif jangka pendek. Hal ini menjadi dorongan positif agar komisaris dan direksi benar-benar mengedepankan keberlanjutan perusahaan dan manfaat publik.

Dari aspek tata kelola, penghapusan tantiem memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat transparansi. Dengan penghapusan tantiem, publik akan melihat BUMN lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi pejabat. Kebijakan ini tidak hanya menekan potensi *moral hazard*, tetapi juga meningkatkan legitimasi BUMN di mata masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset negara dapat tumbuh lebih kuat.

Dari sisi motivasi kerja, meskipun ada kekhawatiran berkurangnya insentif, kebijakan ini justru membuka peluang bagi pembentukan budaya kerja baru yang lebih sehat. Komisaris dan direksi tidak lagi dinilai dari seberapa besar bonus yang diterima, melainkan dari kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Pemerintah bisa mengarahkan bentuk penghargaan baru yang lebih berorientasi jangka panjang, misalnya peningkatan kapasitas profesional, reputasi, dan peluang karier yang lebih luas. Dengan begitu, motivasi kerja tetap terjaga, bahkan beralih ke arah pengabdian kepada negara.

Dalam perspektif daya saing, penghapusan tantiem mungkin terlihat menantang karena sektor swasta masih mengandalkan skema bonus untuk menarik talenta. Namun, langkah ini memberi peluang bagi BUMN untuk menegaskan keunggulannya yang khas, yaitu bekerja di BUMN berarti tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembangunan nasional. Nilai tambah ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi profesional berkualitas, terutama yang ingin berkiprah lebih besar bagi bangsa. Pemerintah juga dapat menyiapkan sistem kompensasi yang lebih adil dan berkelanjutan sehingga BUMN tetap kompetitif di pasar tenaga kerja.

Penghapusan tantiem merupakan bagian dari reformasi besar untuk memperkuat BUMN sebagai agen pembangunan. Dengan langkah ini, BUMN diarahkan menjadi entitas yang lebih ramping, efisien, dan fokus melayani kepentingan rakyat. Efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan ini juga memungkinkan pengalihan dana untuk program produktif, peningkatan dividen negara, maupun investasi kembali dalam penguatan kapasitas perusahaan. Penghapusan tantiem merupakan langkah positif yang membawa optimisme baru bagi efektivitas BUMN. Kebijakan ini memperkuat akuntabilitas, menumbuhkan budaya kerja profesional, meningkatkan legitimasi publik, dan membuka jalan bagi reformasi tata kelola BUMN yang lebih transparan.

Atensi DPR

Penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN merupakan langkah penting dalam reformasi tata kelola perusahaan negara. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, menekan *moral hazard*, dan memastikan kinerja manajemen lebih berpihak pada kepentingan publik. Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini perlu mengantisipasi risiko penurunan motivasi serta berkurangnya daya tarik jabatan strategis di BUMN. Komisi VI DPR RI perlu berperan aktif memastikan kebijakan ini diikuti dengan evaluasi kinerja yang objektif, sistem pengawasan yang kuat, serta transparansi laporan keuangan. Selain itu, diperlukan skema penghargaan alternatif yang berorientasi jangka panjang agar profesionalisme tetap terjaga. Dengan pengawasan ketat dan sinergi antarpemangku kepentingan, kebijakan ini dapat memperkuat efektivitas BUMN sekaligus meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi nasional.

Sumber

bisnis.com, 21 Agustus 2025;
cnbcindonesia.com, 24 Agustus 2025;
cnnindonesia.com, 24 Agustus 2025;
kompas.com, 21 Agustus 2025.

Minggu ke-3 Agustus
(18 s.d. 24 Agustus 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*